

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah menjadi masalah umum. Ini disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial budaya, ekonomi, dan politik, sementara perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan dominasi kuat laki-laki terhadap perempuan dalam kehidupan sosial, sehingga menciptakan batasan antara keduanya dalam struktur masyarakat. Ksetaraan gender ialah prinsip kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kebebasan dan peluang untuk terlibat dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup tidak adanya diskriminasi bagi kedua jenis kelamin untuk terlibat dalam berbagai bidang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bulan Agustus 2023. Dalam data tersebut ditemukan bahwa angka IKG pada tahun 2022 telah mencapai angka 0,459 dimana terjadi penurunan sebesar 0,006 poin di antara tahun sebelumnya yang mencapai 0,465. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan capaian dimensi pemberdayaan, yang dipengaruhi oleh peningkatan persentase perempuan berusia 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan SMA ke atas sebesar 2.08% dari yang sebelumnya 34,87% menjadi 36,95% di tahun 2022 (BPS, 2023).



Gambar 1. 1 Indeks Ketimpangan Gender

Bersamaan dengan itu, *World Economic Forum* (WEF) dalam laporannya mengenai *Global Gender Gap Index* (GGGI) 2023 menyebutkan bahwa Indeks Kesenjangan Gender Global Indonesia mencapai angka 0,697 pada tahun 2023. Meski tidak terdapat perubahan dari tahun sebelumnya, namun Indonesia berhasil menempati peringkat 87 dari 146 negara di dunia. Skor ini menandakan bahwa Indonesia telah mencapai jarak kesetaraan gender 69% dalam berbagai bidang (Pratiwi, 2023).



Gambar 1. 2 Indeks Kesetaraan Gender Indonesia 2020-2023

Berdasarkan dua data tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan pada tingkat ketimpangan gender di Indonesia, namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan di Indonesia telah terbebas dari perilaku ketidaksetaraan gender. Lekatnya dominasi laki – laki pada masyarakat tradisional, meyakini bahwa perempuan ditakdirkan hanya untuk mengurus urusan domestik seperti memasak, melahirkan, dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Perempuan kerap kali tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak - haknya secara menyeluruh, melainkan ruang mereka dibatasi dimana kebebasannya dipersempit. Sebagai manusia, ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan mengisyaratkan bahwasanya perempuan tak punya hak dalam keperluan apa saja atas dirinya, lebih dari itu hal ini juga dianggap sebagai bentuk dari pelanggaran terhadap prinsip - prinsip hak asasi manusia. Akibatnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan tidak akan pernah dihargai dan mereka hanya dianggap sebagai sebatas kelompok pengabdian.

Ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan sendiri dapat terjadi dalam berbagai wujud, antara lain kekerasan (*violence*), marginalisasi, beban kerja ganda, subordinasi, dan stereotipe (Afandi, 2019). Tindak kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun non fisik merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan gender yang paling sering terjadi hingga saat ini. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.371 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan ke Komnas Perempuan. Ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus per hari. Ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan masih terbilang sangat tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus oleh masyarakat terutama pihak berwenang (Komnas Perempuan, 2023).

Dari keseluruhan itu, 339.782 kasus diantaranya juga merupakan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terbagi menjadi kekerasan di ranah personal dan kekerasan di ranah publik. Kekerasan di ranah personal mencapai 336.804 kasus dan merupakan bentuk kekerasan dimana terdapat hubungan antara pelaku dengan korban seperti hubungan pernikahan, kekerabatan, pacar, dan hubungan pekerja dalam rumah tangga. Berikutnya, ada 2.978 insiden kekerasan seksual yang terjadi di domain publik, termasuk kekerasan di wilayah residensial, tempat bekerja, area umum, lingkungan pendidikan, terhadap pekerja migran, dan dengan pejabat negara atau diskriminasi dalam proses pemilihan pejabat publik.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan juga menegaskan bahwa ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban yaitu perempuan telah menjadi penyebab utama. Kekuasaan pelaku semakin bertambah kuat ketika mereka memiliki kekuasaan politik, pengetahuan, jabatan struktural, dan otoritas keagamaan. Selain itu, hal tersebut juga berdampak pada korban dimana korban seringkali merasa sulit untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, meskipun berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindakan kekerasan telah diterapkan.

Dalam segi kekerasan yang dialami oleh perempuan, seringkali perempuan mendapati diri mereka dalam posisi *victim blaming*, di mana perempuan sebagai objek atau sasaran kesalahan dari suatu kejadian (Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti, 2017). Pada banyak kasus kekerasan seksual, perempuan kerap menjadi objek yang selalu disalahkan, entah itu karena cara berpakaian, perilaku, waktu kejadian, atau alasan yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Alasan-alasan tersebut dianggap sebagai hal yang wajar karena laki-laki dianggap memiliki dorongan seksual yang tinggi, sedangkan perempuan, menurut "moralitas masyarakat," dianggap tidak mampu menjaga diri dengan baik. Sebagai akibatnya, korban kekerasan seksual sering kali dilabeli dengan nama-nama yang buruk atau hina oleh lingkungan sosial.

Marginalisasi adalah sebuah proses peminggiran yang dapat menyebabkan kemiskinan lantaran adanya perbedaan jenis kelamin. Salah satu bentuk marginalisasinya yakni mereka yang kerap dipandang negatif ketika memiliki pekerjaan dan bekerja di sektor publik karena hanya dianggap sebagai pencari

nafkah tambahan. Hal ini selaras dengan fenomena yang kerap terjadi yaitu pemberian upah yang berbeda antara laki - laki dengan perempuan. BPS mencatat bahwa per Agustus 2023 rata – rata upah pekerja laki – laki mencapai Rp 3,47 juta yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja perempuan sebesar Rp 2,64 juta. Marginalisasi yang dirasakan oleh perempuan tidak hanya dapat terjadi pada lingkup pekerjaan, melainkan juga telah terjadi di ranah rumah tangga yang juga diperkuat oleh tafsir keagamaan dimana ada pada wujud diskriminasi atas anggota keluarga (Fakih, 1996).

Kultur yang tidak memihak pada perempuan ini secara terus – menerus memaksa adanya perbedaan yang dirasakan oleh perempuan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi pada ranah publik. Hal ini berkaitan dengan kondisi perempuan yang mengalami beban ganda. Masuknya perempuan ke ranah publik didasari oleh beberapa faktor seperti perkembangan zaman, peningkatan kemampuan dalam bersaing, keinginan untuk berkembang, dan alasan yang paling mendasar adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan agar dapat memenuhi kebutuhan (Hidayati, 2015).

Meskipun begitu, rasanya masyarakat masih saja menginginkan perempuan untuk berperan ganda yaitu tidak hanya sebagai pekerja publik - produktif melainkan juga sebagai pekerja domestik - produktif . Sebenarnya hal tersebut tidak akan menjadi masalah jika saja terdapat pola relasi berbasis mitra yang seimbang dalam keluarga untuk meringankan beban domestik. Namun jika tidak ada pembagian peran domestik yang seimbang, maka yang akan terjadi bukan hanya perempuan yang mengalami beban ganda (*double burden*) melainkan *triple burden*.

Akibatnya, akan sulit untuk mewujudkan tujuan untuk menjadikan perempuan sebagai mitra sejajar pria baik di lingkungan keluarga juga publik.

Selanjutnya, terdapat subordinasi yang dilansir dari situs resmi Kementerian PPPA RI merupakan gagasan yang meyakini bahwa satu jenis kelamin memiliki tanggung jawab yang lebih rendah daripada yang lainnya. Gambaran nyata dari subordinasi perempuan adalah bahwa perempuan menduduki posisi yang lebih rendah karena adanya norma-norma masyarakat yang cenderung memisahkan bagaimana peran laki-laki dan perempuan didefinisikan. Laki - laki cenderung dianggap bertanggung jawab untuk urusan publik dan produksi sedangkan perempuan hanya ditugaskan untuk mengurus urusan rumah tangga dan reproduksi.

Hal ini tidak terlepas dari peran keluarga, budaya, bahkan tafsir agama yang baik secara sengaja maupun tidak menciptakan peran tertentu yang pada akhirnya membuat individu berpikir bahwa terdapat peran tertentu antara keduanya yang memang harus dijalankan (Syafe'i, 2015). Akibatnya, peran, kedudukan, dan fungsi perempuan dinilai lebih rendah dari laki – laki.

Bentuk ketidaksetaraan gender yang terakhir adalah stereotipe. Stereotipe gender merupakan pemberian label dengan konotasi negatif yang dapat merugikan dan menciptakan ketidakadilan pada perempuan. Stereotipe yang telah ditanamkan secara turun temurun dan dianggap benar oleh masyarakat tersebut telah membuat ruang gerak bagi perempuan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, perempuan akan merasa enggan, takut, dan malu jika tidak sejalan dengan stereotipe yang ada. Ketakutan tersebutlah yang membuat stereotipe gender semakin lebih kuat (Ragil et al., 2021).

Beberapa bentuk pelabelan negatif yang masih menempel pada perempuan dan masih berkembang dimasyarakat antara lain, adanya anggapan bahwa perempuan dengan pendidikan yang tinggi akan lebih memilih untuk melajang seumur hidupnya dan sulit mendapatkan pasangan hidup karena akan banyaknya laki – laki yang merasa minder terhadap pencapaiannya. Stereotipe seperti itulah yang semakin membatasi hak dan kebebasan perempuan untuk berdaya. Penempatan perempuan pada strata kedua dalam masyarakat tersebut yang membuat perempuan semakin dianggap tidak lebih kuat, cerdas, dan mapan dari laki – laki (Yovita et al., 2022).

Berbicara mengenai gender, berarti kita berbicara mengenai kedudukan pria dan wanita dalam lingkup bermasyarakat. Gender sendiri bukan suatu hal yang bersifat alami dan melekat pada seseorang sejak lahir (kodrat), melainkan gender merupakan konstruksi pandangan masyarakat terhadap laki – laki dan perempuan beserta kedudukannya. Pandangan – pandangan ini dibentuk oleh beberapa faktor, salah satunya adalah budaya. Meskipun secara anatomis berbeda, masyarakat memaknai gender sebagai pembagian peran antar keduanya. Sebenarnya, keduanya terlahir dengan posisi yang sejajar. Namun, dalam perkembangannya, publik punya pemahaman yang berbeda mengenai peran dan tanggung jawab dari keduanya.

Perbedaan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti munculnya aturan UU yang diskriminatif, perlindungan hukum minim, serta yang paling berpengaruh adalah budaya yang bias akan gender seperti lekatnya patriarki dalam masyarakat.

Budaya patriarki yang terus bertahan hingga kini merupakan warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi. Istilah "patriarki" berasal dari kata "patriarkat," yang merujuk pada struktur di mana laki-laki ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan utama dan sentral. Sistem budaya yang didominasi oleh patriarki dapat menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan gender, yang kemudian berdampak pada berbagai aktivitas manusia. Posisi subordinasi atau inferior yang ditempatkan pada perempuan timbul dari ketidaksetaraan peran antara keduanya menyebabkan ketidaksetaraan akses bagi setiap individu. Adat dan tradisi yang terus menerus menganut nilai-nilai dominasi laki-laki menjadi faktor pokok yang menyulitkan penghapusan patriarki.

Instrumen hukum di Indonesia sendiri sebenarnya telah memberi pengakuan pada prinsip kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana ada di Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Pasal itu memnjabarkan bahwasanya semua warga punya posisi sejajar di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib tunduk atas hukum dan pemerintahan itu (Kania, 2015). Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 juga membahas tentang masalah ketidaksetaraan gender dengan menekankan hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tak terbatas. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif (Judiasih, 2022). Diskriminasi ini mencakup aspek ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan afiliasi politik yang bisa mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan dan perlakuan yang setara di masyarakat serta berbagai aspek kehidupan lainnya.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender di Indonesia, sejak April 2022 lalu pemerintah juga sudah mengetok palu disahkannya UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengelola terkait pencegahan semua jenis kejahatan seksual, penanganan, perlindungan, pemenuhan hak korban, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk membentuk lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia, namun dalam implementasinya masih terbilang belum optimal. Sehingga muncul berbagai tuntutan dan usaha guna menggapai kesetaraan gender dalam bentuk aksi nyata.

Salah satu bentuk aksi nyata dalam mengatasi permasalahan mengenai ketidaksetaraan gender adalah dengan melalui sosialisasi yang berfokus pada isu gender. Sosialisasi adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan isu-isu sosial yang tidak berkaitan dengan komersial (Surbakti, 2006). Sosialisasi mengkomunikasikan pesan mengenai ide, gagasan, dan inovasi sosial yang penting kepada masyarakat. Sosialisasi kesetaraan gender adalah upaya menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang pentingnya menghapus segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan untuk mencapai kesetaraan.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengupayakan pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender ini melalui Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang digagas oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2003, setiap tanggal 25 November yang bertepatan dengan Hari HAM. Mengutip dari buku pedoman pelaksanaan Kampanye 16 HAKTP, aktivitas ini meliputi:

- a. Menyusun kegiatan di tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal untuk mendukung strategi, program, dan sumber daya yang inklusif, menyeluruh, dan berjangka panjang guna mencegah kekerasan seksual.
- b. Menjalankan kampanye online di media sosial seperti YouTube dan TikTok dengan tagar #GerakBersama.
- c. Menyelenggarakan penggalangan dana untuk korban kekerasan seksual dan memberikan bantuan kepada organisasi yang mendampingi korban.
- d. Menyediakan layanan konseling gratis sebagai dukungan kepada perempuan penyintas KBG agar segera pulih dan mandiri.
- e. Memulai diskusi publik tentang berbagai peraturan hukum yang melindungi perempuan korban kekerasan.

Meskipun telah berlangsung selama 20 tahun, kampanye 16 HAKTP ini dianggap belum cukup optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tema yang diangkat dalam kegiatan ini dianggap kurang variatif dan hanya berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan saja, sedangkan permasalahan ketidaksetaraan gender yang dihadapi perempuan tidak hanya berkisar pada kekerasan saja. Selain itu, luasnya khalayak sasaran yang tersebar di seluruh Indonesia serta adanya gap teknologi dan pengetahuan yang terjadi antara khalayak yang sudah mengetahui dan yang belum tahu mengenai kekerasan terhadap perempuan telah menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas Perempuan (Sari & Savitri, 2019).

Meskipun Komnas Perempuan telah bermitra dengan organisasi lokal di seluruh Indonesia, namun *output* yang dihasilkan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Dibutuhkan kontribusi atau

partisipasi dari masyarakat untuk turut serta dalam mengsosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender.

Salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya menciptakan kesetaraan gender adalah dengan mendirikan organisasi perempuan. Rifka Annisa merupakan salah satu contoh organisasi perempuan yang hadir di tengah masyarakat dalam membela perempuan dan menciptakan lingkungan yang adil. Dilansir dari situs resminya, Rifka Annisa didirikan pada 26 Agustus 1993 oleh beberapa aktivis perempuan seperti Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifah Iskandar, dan sebagainya. Nama "Rifka Annisa" berarti "Teman Perempuan". Organisasi ini berkomitmen untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan. Kehadiran Rifka Annisa dipicu oleh keprihatinan atas dominasi laki-laki yang diperkuat oleh budaya patriarki, yang berdampak melemahkan perempuan. Sebagai hasilnya, perempuan sering kali mendapat perlakuan yang tidak adil.



Gambar 1. 3 Logo Rifka Annisa

Rifka Annisa muncul sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menekankan isu-isu perempuan dalam usahanya untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil gender tanpa kekerasan terhadap perempuan dengan mengutamakan asas keadilan sosial,

pemahaman, dan perhatian, kemandirian, kejujuran yang baik, serta pelestarian nilai-nilai tradisional.

Dalam upaya mewujudkan visinya tersebut, Rifka Annisa melalui misinya berusaha untuk melibatkan perempuan secara spesifik dan masyarakat secara luas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan membangun masyarakat yang adil gender. Salah satu taktiknya adalah dengan memberdayakan penyintas kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas, serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan.

Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender menjadi fokus utama bagi Rifka Annisa mengingat tanpa adanya kesadaran maka masyarakat akan terus terbelenggu oleh budaya patriarki. Rifka Annisa awalnya fokus pada memberikan layanan pendampingan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, termasuk konseling dan pendampingan hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa penghapusan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan tidak bisa dilakukan secara optimal jika budaya patriarki masih menjadi norma di Indonesia.

Rifka Annisa mulai menyadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran melalui penanaman nilai – nilai kesetaraan gender. Dalam mempromosikan nilai – nilai kesetaraan gender dengan mengangkat isu – isu perempuan di tengah masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, sebagai organisasi yang sudah

ada lebih 30 tahun hingga saat ini Rifka Annisa masih sangat aktif mempromosikan kesetaraan gender dengan mengedepankan nilai – nilai keadilan bagi perempuan.

Konsistensi yang dimiliki oleh Rifka Annisa untuk terus berkomitmen mempromosikan nilai – nilai kesetaraan gender ini tidak terlepas dari peran budaya organisasinya yang kuat. Budaya organisasi yang optimal adalah budaya yang dapat mendukung dengan baik visi dan misi serta strategi organisasi yang merupakan bagian di dalamnya (Ali et al., 2013)

Budaya organisasi sendiri mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota – anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Sistem makna bersama ini mencakup seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi tersebut (Robbins, 2003). Dalam suatu organisasi, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi yang krusial. Pertama, budaya organisasi berperan sebagai penentu batas. Artinya, budaya menciptakan perbedaan atau distingsi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya (Ali et al., 2013). Selain itu, budaya juga membawa suatu identitas bagi anggotanya, sehingga semakin jelas persepsi dan nilai – nilai bersama organisasi didefinisikan maka semakin kuat orang dapat disatukan dengan misi organisasi dan merasa menjadi bagian penting darinya (Robbins, 2003)

Kedua, budaya organisasi berfungsi sebagai alat penggerak komitmen yang tinggi pada misi organisasi. Jika terdapat budaya yang kuat dalam suatu organisasi, maka setiap anggotanya akan merasa bahwa mereka merupakan bagian dari yang besar dan akan bersedia untuk terus terlibat dalam keseluruhan kerja organisasi. Budaya yang kuat akan mampu membuat setiap anggota ingat makna sebenarnya

organisasinya tersebut, sehingga akan meningkatkan komitmen yang lebih luas dari kepentingan masing – masing individu serta menambah konsistensi perilaku anggotanya (Wibowo, 2011).

Ketiga, budaya organisasi memperjelas dan memperkuat standar perilaku serta meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang mempersatukan organisasi dengan memberikan standar – standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggotanya (Robbins, 2003). Pada akhirnya, budaya organisasi berperan dalam mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggotanya.

Kuatnya budaya yang dimiliki oleh Rifka Annisa telah membuat organisasi perempuan ini menjadi salah satu organisasi yang cerdas budaya, dimana Rifka Annisa dapat mensinergikan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan berperilaku sehingga dapat terus bertahan membela perempuan dengan mempromosikan nilai – nilai kesetaraan gender meskipun berada di tengah lingkungan yang sangat patriarkis. Dengan budaya organisasi yang kuat pula, Rifka Annisa dapat memastikan bahwa komitmen mereka terhadap kesetaraan gender tidak hanya terjaga tetapi juga berkembang, memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam mempromosikan gender di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Kesetaraan gender masih menjadi masalah utama sampai sekarang, itu bisa tercermin dari angka Indeks Ketimpangan Gender dan beberapa kasus ketidakadilan gender seperti kekerasan terhadap perempuan yang masih cukup

tinggi. Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia, namun dalam implementasinya masih terbilang belum optimal. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender serta yang paling berpengaruh adalah budaya yang bias akan gender seperti lekatnya patriarki dalam masyarakat.

Rifka Annisa, sebuah organisasi non-pemerintah yang sudah berjalan melebihi tiga dekade, telah secara aktif melakukan hadir di tengah masyarakat dengan berfokus pada isu-isu perempuan, dengan tujuan mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi perempuan. Konsistensi yang dimiliki oleh Rifka Annisa dalam mengeksekusi visi misinya untuk mewujudkan lingkungan yang adil gender ini tidak terlepas dari peran budaya organisasi yang kuat dan kemampuannya dalam menyebarkan nilai – nilai yang kesetaraan gender yang dianutnya melalui komunikasi transformatif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh bagaimana Rifka Annisa menjalankan upayanya dalam menciptakan lingkungan sosial yang berkeadilan gender, khususnya di tengah masyarakat yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkis. Ketertarikan ini didasarkan pada komitmen Rifka Annisa dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan membangun tatanan sosial yang lebih setara bagi semua kelompok. Maka penulis merumuskan permasalahan tersebut ke dalam pertanyaan penelitian “Bagaimana Rifka Annisa berupaya mewujudkan masyarakat yang adil gender melalui komunikasi transformatif?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan guna memahami dan mendeskripsikan bagaimana Rifka Annisa berupaya dalam mewujudkan masyarakat yang adil gender melalui komunikasi transformatif

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan dan memberikan informasi tambahan pada bidang keilmuan komunikasi, terutama yang berfokus pada isu – isu perempuan. Lalu kajian juga diharapkan bisa jadi literatur acuan tambahan peneliti berikutnya terutama berkaitan dengan Teori Strukturasi Gender, dan Feminisme Liberal.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa mencerminkan dan menyumbang wawasan terhadap Rifka Annisa Yogyakarta serta stakeholder, khususnya bagaimana Rifka Annisa berupaya mewujudkan masyarakat yang adil gender. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi maupun komunitas lain yang membela perempuan dan sama – sama berjuang dalam menciptakan kesetaraan gender.

1.4.3. Signifikansi Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan publik yang tertarik dengan pembahasan mengenai isu gender baik individu maupun kelompok terkait Rifka Annisa sebagai organisasi perempuan yang berjuang untuk menciptakan lingkungan yang adil gender. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya menumbuhkan

nilai – nilai kesetaraan gender untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari bias gender yang dapat membatasi perempuan

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Paradigma Penelitian

Definisi mengenai paradigma dapat bermacam – macam, tergantung dari sudut pandang yang dipakai. Paradigma sendiri dapat diartikan sebagai laksana jendela untuk mengamati dunia luar, karenanya ada pula yang menyebutnya sebagai perspektif atau cara pandang seseorang dalam suatu pokok permasalahan yang untuk dipecahkan (Salim, 2006). Dalam penelitian, paradigma merupakan kerangka berpikir mengenai teori dan fenomena yang mencakup asumsi, masalah utama, metode penelitian, desain penelitian, dan hasil penelitian.

Paradigma pada penelitian ini ialah paradigma kritis. Paradigma kritis dalam penelitian sosial menganggap bahwa penelitian adalah sebuah alat yang dapat membantu untuk menghilangkan pemahaman dan ide-ide yang salah tentang masyarakat dan kondisi asli sosial. Paradigma ini memandang manusia sebagai entitas kreatif dan penuh kasih, serta menunjukkan sikap kritis terhadap sistem dominasi dan struktur ketidakadilan yang menindas masyarakat (Sarantakos, 2013). Paradigma kritis memulai penelitiannya dengan memperhatikan bukti ketidakadilan. Selanjutnya, paradigma ini berusaha mengubah struktur atau sistem ketidakadilan dengan membangun posisi baru yang lebih adil. Paradigma kritis juga melihat peneliti dan objek sebagai satu kesatuan, di mana nilai-nilai yang dianut oleh peneliti berperan dalam menentukan kebenaran suatu hal, sehingga paradigma ini sangat menekankan konsep subjektivitas (Salim, 2006).

Pendekatan etnografi kritis menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pendekatan etnografi kritis merupakan hal yang umum dalam ilmu sosial, dimana pendekatan ini menganalisis secara kritis keterkaitan antara praktik sosial dan prinsip – prinsip budaya makro secara menyeluruh (Sarantakos, 2013). Etnografi kritis bertujuan untuk menghasilkan perubahan dengan menyuarakan pihak – pihak yang lemah, oleh karena itu etnografi kritis biasanya digunakan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kelompok atau komunitas tertentu dengan membantu mengidentifikasi kebutuhan mereka dan memberikan informasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan perubahan (Daymond & Holloway, 2011)

1.5.2. State of the Art

Di bawah ini berbagai penelitian yang berkesinambungan dengan kesetaraan gender yang telah dijalankn sebelumnya, di antaranya :

- a. Penelitian disusun oleh Susmawati dkk (2023) dalam jurnal Rayah Al – Islam, Universitas Mataram Indonesia yang berjudul **“Kesetaraan Gender Sebagai Solusi Bagi Perempuan Sasak di Tengah Belenggu Hegemoni Budaya Nyeseke”**. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perempuan yang masih terhambat oleh budaya "nyeseke" yang tetap dilestarikan hingga kini. Namun, ada juga perempuan yang telah bebas dari budaya tersebut dan memperoleh akses pendidikan serta pekerjaan yang setara dengan laki-laki tanpa diskriminasi. (Susmawati et al., 2023)

- b. Penelitian disusun oleh Adnyani dan Rusadi pada tahun 2023, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta yang berjudul **“Media Sosial Sebagai Katalis Pendidikan: Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia Melalui Perspektif Strukturasi ”**. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan netnografi, yang difokuskan pada konsep struktur Vincent Mosco mengenai peran agensi dalam mencapai kesetaraan gender melalui gerakan sosial di Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram memiliki potensi untuk memperluas gerakan kesetaraan gender, memungkinkan individu untuk menyuarakan isu-isu gender dan mendapatkan dukungan dalam menyebarkan pesan gerakan. (Adnyani & Rusadi, 2023).
- c. Penelitian disusun oleh Septiningrum dan Rachmiate pada tahun 2022, Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung dengan judul **“Kampanye Membangun *Woman Empowerment* Pada Akun Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Kampanye Pada Akun Instagram @magdaleneid Dalam Membangun *Woman Empowerment*”**. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan model komponensial kampanye Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa situs Magdalene.co dipakai sebagai sumber informasi tentang penyelenggaraan kampanye. Instagram dipakai sebagai saluran kampanye yang dianggap lebih dialogis. Pesan-pesan kampanye yang disampaikan melalui Instagram dianggap lebih aktual dan beragam. Tingkat engagement dianggap sebagai salah satu metrik keberhasilan kampanye.. (Septiningrum & Rachmiate, 2022).

- d. Penelitian disusun oleh Rosa dkk tahun 2022, Jurnal Multidisiplin *West Science*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan judul **“Peran Gerakan Perempuan Mahardika Dalam Melawan Diskriminasi Dari Budaya Menindas dan Kemiskinan”**. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan teori utama yaitu Standpoint Theory dan Feminis Sosialis tujuannya melihat bagaimana peran gerakan organisasi Perempuan Mahardika dalam mengaktualisasi visi untuk melawan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan. Hasilnya mencerminkan bahwasanya Perempuan Mahardika terus melakukan konsolidasi secara *top and down* untuk menekan pemerintah dalam mendorong kebijakan yang tidak bias gender serta melakukan pemberdayaan perempuan melalui pengadaan pendidikan politik (Rosa et al., 2022)
- e. Penelitian disusun oleh Sari dan Savitri pada tahun 2019, Jurusan Hubungan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta yang berjudul **“Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”**. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif. Teori utamanya yakni teori kampanye dengan model kampanye Nowak & Warneryd untuk mengetahui apa saja unsur kampanye serta hambatan yang dialami oleh KOMNAS Perempuan hingga kurang tercapainya tujuan dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Sari & Savitri, 2019).

1.5.3. Teori

Pada penelitian ini penulis mengacu pada teori guna memperoleh wawasan yang lebih baik. Isu perempuan juga dapat masuk ke dalam level komunikasi organisasi, karena organisasi memiliki tanggung jawab sosial salah satunya adalah dengan mempromosikan kesetaraan gender dan mendukung hak – hak perempuan. Sebuah kajian oleh Joan Acker dalam Gender dan Ras dalam Komunikasi Organisasi, berpendapat bahwa organisasi dibentuk oleh gender sehingga tidak hanya mencerminkan dinamika gender dalam struktur dan budaya mereka, tetapi juga sebagai formasi sosial gender dan turut berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan norma – norma gender dalam masyarakat luas (Littlejohn & Foss, 2014).

1.5.3.1. Teori Strukturasi Gender

Karakteristik yang penting dari teori ini adalah melihat perubahan sebagai sebuah proses yang ada di mana – mana dan menggambarkan bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi oleh agen manusia yang bertindak melalui medium dari struktur tersebut (Sunarto, 2009). Teori strukturasi sendiri menganggap bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari interaksi antara agen dan struktur (Adnyani & Rusadi, 2023).

Struktur merupakan seperangkat aturan dan sumber daya yang mengatur *social behaviour*, sedangkan agensi merujuk pada kemampuan individu untuk melakukan tindakan dan menetapkan keputusan. Struktur sendiri tidak bersifat tetap, melainkan diproduksi dan dapat diubah melalui tindakan individu. Marshall Scott Poole dan Robert McPhee menempatkan gagasan mengenai teori ini lebih

jauh dalam komunikasi organisasi, karena bagi Poole dan McPhee struktur merupakan manifestasi dan juga hasil dari komunikasi dalam organisasi (Littlejohn & Foss, 2009). Pada teori ini hal yang dihasilkan oleh industri budaya (organisasi) memiliki peranan penting dan strategis dalam proses produksi dan wacana yang digunakan oleh konsumennya (stakeholder) untuk memberi makna pada dunia ini.

Teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori ekonomi – politik yang dalam paradigma kritis mengikuti Marx dalam memberikan perhatian pada pengorganisasian serta produksi pada industri budaya maupun industri lainnya. Pandangan ini tidak mengabaikan pilihan – pilihan yang dibuat oleh produsen dan konsumen, melainkan melihat apa yang dilakukan oleh produsen maupun konsumen dalam struktur yang lebih luas lagi (Sunarto, 2007).

Teori Strukturasi Gender sendiri bertitik tolak dari Teori Strukturasi dari Anthony Giddens yang kemudian dikaitkan dengan teori feminisme (Sunarto, 2007), sehingga dalam pengertian ini strukturasi gender adalah produksi dan reproduksi relasi gender melalui penggunaan aturan (rules) dan sumber daya (resource) yang dimiliki oleh aktor sosial dalam interaksi. Teori Strukturasi Gender memiliki dua konsep penting, yaitu produksi struktur gender (*engendered gender structure*) dan reproduksi ganda (*twofold reproduction*) (Sunarto, 2009).

Produksi struktur gender merupakan kombinasi antara gender sebagai sebuah konsep sentral dalam teori feminis dan struktur sebagai sebuah konsep sentral dalam teori strukturasi. Gabungan seperti itu mengambil semua manfaat dari teori strukturasi dengan menempatkan gender sebagai inti dari model tersebut,

dengan menempatkan gender sebagai inti dari model strukturasi, teori ini mengintegrasikan perspektif feminis ke dalam analisis struktur sosial.

Produksi struktur gender mengacu pada struktur dominasi, signifikansi, dan legitimasi sebagai prinsip – prinsip pengorganisasian gender yang “tidak hadir” dalam penstrukturan relasi gender yang “hadir” dalam wujud modalitas aturan (rules) dan sumber daya (resource) oleh agen. Dalam konteks gender, ini berarti bahwa relasi gender diatur oleh struktur yang mendefinisikan siapa yang memiliki kekuasaan, bagaimana makna gender dibentuk, dan bagaimana peran gender dianggap sah atau benar dalam masyarakat.

Hal ini berarti bahwa dalam proses produksi struktur gender, struktur – struktur yang sebelumnya tidak mempertimbangkan gender kini diakui sebagai struktur yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh gender. Artinya setiap aturan, sumber daya, dan struktur sosial yang ada dipahami dalam konteks bagaimana mereka mereproduksi atau menantang relasi kekuasaan gender.

Reproduksi ganda mengacu pada konsep yang menggambarkan bagaimana struktur sosial dan tindakan individu saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial yang ada. Dalam pengertian ini struktur dipahami sebagai aturan (semantik dan normatif) dan sumber daya (alokatif dan otoritatif). Ketika digenderkan ini bertambah dengan aspek seksualitas yang menjadi bagian dari sistem pengetahuan agen (aturan semantika, normantika, dan seksualitas).

Pada konteks penelitian ini, konsep strukturasi gender digunakan untuk melihat dan memahami lebih lanjut bagaimana Rifka Annisa berupaya menciptakan

lingkungan dimana norma – norma, nilai – nilai, dan praktik yang lebih adil gender menjadi bagian integral dari masyarakat, sehingga memungkinkan terciptanya struktur sosial baru yang lebih inklusif dan setara.

1.5.3.2. Feminsime Liberal

Feminisme, sebagai sebuah kerangka pemikiran, merupakan telaah yang komprehensif tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia, dipelajari dan berkembang dari perspektif perempuan (Hidayati, 2018). Feminisme sebagai sebuah teori, membantu gerakan perempuan dengan memperlakukan perempuan sebagai bagian integral dari manusia yang harus diperlakukan dengan adil dan setara. Tujuan utama feminisme adalah memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, memberikan perempuan hak untuk mengendalikan kehidupan mereka, baik di dalam maupun di luar rumah (Maulid, 2022). Masyarakat yang adil tercipta melalui gerakan yang dikenal sebagai feminisme liberal, memungkinkan individu untuk mengekspresikan otonominya dan memuaskan dirinya.

Penelitian ini memiliki unsur feminisme dan masuk ke dalam aliran gerakan feminisme liberal. Seperti namanya, feminisme liberal merupakan gelombang pertama dalam aliran feminis. Feminisme liberal memakai pandangan aliran politik liberal sebagai dasar pemikirannya melalui proses rekonstruksi dan rekonseptualisasi (Tong, 2007).

Kaum liberal memandang hak sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga menurut mereka, setiap orang harus diberi hak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, selama tidak melanggar hak orang lain. Mereka

meyakini bahwa negara yang adil akan memberikan perlindungan atas hak dan kebebasan individu. Aliran feminisme liberal, yang dipimpin oleh Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, dan Harriet Taylor (Mill), mengacu pada filsafat liberalisme yang menekankan kebebasan individu, nalar setiap individu, kepuasan diri, otonomi individu, dan minimalisasi intervensi negara dalam urusan individu.

Mary Wollstonecraft (1759 – 1799) dianggap sebagai pelopor awal dari gerakan aliran feminisme liberal. Melalui karyanya, "A Vindication of the Rights of Woman", ia menegaskan bahwa perempuan harus diberi pendidikan yang setara dengan laki-laki agar mereka dapat mengembangkan kapasitas rasional dan moral. Dengan demikian, perempuan dapat tumbuh dan menjadi individu yang mandiri dan bermoral (Maulid, 2022). Pada dasarnya, Wollstonecraft menekankan bahwa perempuan adalah personhood - manusia yang lengkap dengan kemampuan nalar dan harga diri untuk mengatur nasibnya sendiri. Oleh karena itu, ia mendorong perempuan untuk menjadi pembuat keputusan yang mandiri, sehingga tidak bergantung pada keinginan suami atau anak-anaknya. Melalui karyanya, Wollstonecraft berusaha memperkenalkan gambaran seorang perempuan yang memiliki kekuatan fisik dan mental (Tong, 2007).

Berlawanan dengan pandangan Wollstonecraft, John Stuart Mill dan Harriet Taylor (Mill) melihat nalar tidak hanya sebagai kemampuan moral untuk membuat keputusan sendiri, tetapi juga sebagai proses berpikir yang hati-hati, sebagai upaya untuk memenuhi diri sendiri atau memakai akal untuk mencapai keinginan (Tong, 2007). Maka, baik Mill maupun Taylor menegaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan adalah dengan memberikan kebebasan kepada setiap

individu untuk mengejar tujuan mereka selama hal itu tidak menghambat atau membatasi orang lain dalam proses pencapaian mereka.

Feminisme liberal berusaha menerapkan filosofi liberalisme pada kesetaraan gender. Mereka percaya bahwa perempuan mengalami penindasan lantaran tidak memiliki hal politik dan sipil, hal ini terlihat dari minimnya perempuan yang dilibatkan dalam perjuangan sipil dan politik (Dhewy, 2022). Hal ini dapat diatasi melalui reformasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki – laki dan perempuan.

Ketika reformasi diperkenalkan, untuk dapat memastikan bahwa perubahan yang diusulkan dapat diterima dan di internalisasikan oleh masyarakat maka dibutuhkan alat untuk dapat menyampaikan perubahan tersebut, salah satunya adalah dengan peningkatan kesadaran. Melalui peningkatan kesadaran, mempengaruhi kebijakan, pemberdayaan perempuan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dapat mempercepat terwujudnya reformasi kesetaraan gender. Dengan demikian, ”pembebasan” perempuan akan dapat tercapai dengan menghapus praktik diskriminatif dan mendorong persamaan hak untuk perempuan.

1.5.3.3. Komunikasi Transformatif

Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran pikiran yang menitikberatkan pada unsur kesamaan makna antara komunikator dengan komunikan. Pada proses penyampaian pesan dalam komunikasi, selain dapat memberi pengertian sebaiknya juga dapat mempengaruhi komunikan untuk bisa menerima dan bertindak sesuai dengan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator sehingga tercipta suatu umpan balik (Nurani, 2020).

Transformatif adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate. Perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang – ulang atau melipatgandakan (Gushevinalti et al., 2020).

Berdasarkan pengertian diatas komunikasi transformatif mewakili suatu kerangka konseptual yang menitikberatkan pada peran komunikasi dalam merangsang perubahan yang signifikan dalam pemahaman, perilaku, atau struktur sosial dalam individu atau kelompok (Manuahe et al., 2024). Sebuah proses komunikasi yang ditujukan untuk membawa perubahan mendalam pada individu, kelompok, maupun masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran baru dan mendorong tindakan yang menghasilkan perubahan sosial, khususnya dalam hal ketidakadilan atau ketimpangan yang ada. Josph L. Polman, seorang Profesor Psikologi Pendidikan dan Ilmu Pembelajaran menegaskan bahwa komunikasi transformatif dapat terjadi ketika komunikator dengan komunikan dapat saling berpartisipasi dalam proses komunikasi, sehingga akan memunculkan sebuah tindakan setelah proses komunikasi(Nurani, 2020).

Pemahaman yang berasal dari kata paham dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengerti atau menafsirkan sesuatu. Proses pemahaman merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang atau pemikiran yang benar mengenai suatu hal (Jannah et al., 2023).

Pada taksonomi Bloom, pemahaman digolongkan dalam ranah kognitif tingkatan yang kedua hal ini dikarekanakan pemahaman memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan pengetahuan. Hal ini berarti pemahaman tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga dapat menginterpretasi dan mengaplikasikan informasi yang telah didapat. Merubah pemahaman dalam komunikasi transformatif berarti mengubah cara pandang, persepsi, atau keyakinan individu maupun kelompok melalui proses komunikasi. Tujuannya adalah untuk membawa perubahan mendalam pada cara individu atau kelompok dalam memahami suatu isu. Proses ini sering melibatkan dialog mendalam, refleksi kritis, dan pemaparan terhadap perspektif yang berbeda.

Perilaku merupakan sebuah tindakan atau respon yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berinteraksi dengan lingkungannya, hal ini dapat berupa tindakan fisik maupun respon berupa emosional atau mental (Geograf, 2023) Merubah perilaku dalam komunikasi transformatif merupakan proses dimana individu atau kelompok mengubah tindakan, sikap, atau cara berinteraksi mereka sebagai hasil dari refleksi kritis, pemahaman baru, dan keterlibatan dalam dialog yang memicu perubahan. Hal ini berarti menggeser perilaku lama yang didasarkan pada asumsi, stereotipe atau kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih sejalan dengan nilai – nilai kesetaraan, inklusi, dan keadilan sosial. Proses ini dapat dilakukan dengan melibatkan audiens dalam dialog dan partisipasi aktif. Melalui kegiatan tersebut memungkinkan individu terlibat dalam diskusi, memberikan tanggapan, dan menemukan solusi bersama. Ketika individu merasa terlibat, maka mereka akan lebih mungkin mengadopsi perilaku baru karena mereka berpartisipasi

dalam proses perubahan tersebut. Selain itu, perubahan perilaku juga dapat dilakukan dengan menggunakan pengulangan dan konsistensi pesan perubahan yang disampaikan melalui kampanye terus – menerus.

Struktur merujuk pada pola – pola, norma, aturan, dan praktik yang membentuk hubungan antarindividu dalam masyarakat dan mempengaruhi bagaimana individu bertindak, berinteraksi, dan membentuk identitas mereka. Struktur dapat mencakup pembagian peran gender, sistem kelas sosial, atau kebijakan hukum yang mendukung ketidaksetaraan. Komunikasi transformatif bertujuan tidak hanya mengubah perilaku individu melainkan juga struktur yang mendasari ketidakadilan atau ketidaksetaraan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkritisi struktur dominan untuk menciptakan kesadaran kolektif melalui dialog yang inklusif dengan membuka ruang bagi kelompok yang tertindas untuk menyoroti perspektif mereka sehingga kesadaran mengenai ketidakadilan mulai menyebar.

Melalui penekanan pada pencapaian perubahan yang lebih dalam dan berkelanjutan melalui proses komunikasi, teori ini berujuan untuk mencapai transformasi, bukan hanya sekedar penyampaian pesan informasi atau persuasi sederhana. Tujuan utama dari komunikasi transformasi adalah menciptakan pandangan baru dan lebih mendalam terhadap suatu dunia atau isu tertentu. Proses ini mendorong individu atau kelompok untuk melihat suatu perspektif baru, merangsang pemahaman yang lebih mendalam, dan memperkuat perubahan perilaku. Pemahaman konsep komunikasi transformatif memberikan panduan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai perubahan yang

signifikan dalam pemahaman dan perilaku masyarakat secara holistik (Manuahe et al., 2024).

Pada konteks organisasi, komunikasi transformasi menempatkan fokus pada membangun pemahaman bersama, menginspirasi visi yang kuat, dan membentuk keterlibatan yang luas antara organisasi dengan masyarakat (Helmi et al., 2023). Mereka menggunakan komunikasi yang inspiratif dan memotivasi untuk merangsang pemikiran kritis dan kreativitas sehingga menciptakan energi positif yang mempercepat proses transformasi. Dalam konteks kesetaraan gender, hal ini relevan karena memberikan kontribusi pada pembentukan keyakinan dan praktik terhadap nilai – nilai kesetaraan gender yang lebih mendalam.

1.6. Asumsi Penelitian

Asumsi pada penelitian ini komunikasi transformatif yang dilakukan Rifka Annisa terjadi dalam konteks dimana struktur sosial dan agensi individu saling memengaruhi. Rifka Annisa berperan sebagai agen perubahan, berupaya untuk mengubah struktur gender meskipun tetap dipengaruhi oleh struktur tersebut. Komunikasi ini tidak hanya mereproduksi struktur sosial yang ada, namun juga berpotensi mengubahnya dan menciptakan norma dan praktik baru yang mendukung kesetaraan gender. Melalui pendekatan yang didasarkan pada perempuan marginal terutama korban kekerasan berbasis gender sebagai sumber pengetahuan yang valid, Rifka Annisa berupaya mewujudkan kesetaraan gender melalui reformasi hukum, kebijakan, dan pendidikan sesuai dengan pandangan feminsme liberal yang percaya bahwa perubahan dalam struktur formal dapat meningkatkan status perempuan.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Komunikasi transformatif memusatkan perhatian pada kegiatan dalam mengubah pemahaman, perilaku pada individu dan kelompok, serta struktur sosial yang ada. Pada penelitian ini, konsep ini menegaskan terkait upaya Rifka Annisa dalam melakukan transformasi pada pemahaman, perilaku, dan struktur yang lebih adil gender dengan menggunakan sudut pandang perempuan. Perubahan pemahaman, perilaku, dan struktur disini akan menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif terkait persamaan hak dan pemberdayaan perempuan, kekerasan berbasis gender, hak reproduksi dan kesehatan, hak dan perlindungan bagi kelompok marginal, serta keseimbangan kerja dan keluarga.

Melalui integrasi transformasi pemahaman, perilaku, dan struktur sebagai bagian dari strategi yang holistik dan saling mendukung. Perubahan pemahaman bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan keyakinan baru tentang gender, yang kemudian diterapkan dalam bentuk perilaku yang lebih adil dan inklusif. Perubahan perilaku ini pada gilirannya akan mendukung perubahan struktur dengan menciptakan lingkungan sosial, hukum, dan institusi yang lebih adil gender.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Tipe dan Desain Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pendekatan interpretatif dan naturalistik yang menghasilkan data deskriptif. Ini artinya penelitian kualitatif berupaya memahami atau menafsirkan fenomena dalam konteks alamiahnya, dengan memperhatikan makna yang diberikan oleh individu terhadap fenomena tersebut (Sarantakos, 2013).

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan pengumpulan data empiris akan melibatkan pengalaman pribadi, wawancara, studi kasus, observasi, dan sejarah yang dapat memberikan gambaran makna dalam kehidupan individu.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan guna menjabarkan korelasi antara fenomena yang sedang diteliti dan obyek kajian. Jenis penelitian ini dipakai guna mencerminkan situasi di masyarakat dan objek yang dipelajari, dengan tujuan mendeskripsikan fakta-fakta yang terkait secara menyeluruh (Hudayat, 2007).

Desain pada penelitian ini memakai etnografi kritis. Etnografi kritis sendiri memberikan tanggapan terhadap masyarakat saat ini dimana sistem kekuasaan, hak istimewa, dan otoritas berusaha untuk meminggirkan individu yang berasal dari berbagai kelas, ras, dan jenis kelamin (Creswell & Poth, 2018). Orientasi dari etnografi kritis sendiri adalah untuk memberdayakan individu dengan memberikan mereka lebih banyak otoritas, menentang status quo, dan mengatasi kekhawatiran mengenai kekuasaan dan kontrol. Dengan kata lain, penelitian etnografi kritis berusaha untuk mengadvokasi emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat.

Etnografi kritis dalam penelitian ini dapat menjadi metode untuk mengungkapkan bagaimana Rifka Annisa berusaha untuk menumbuhkan dan menyebarkan nilai – nilai kesetaraan gender. Etnografi kritis dapat membantu memahami konteks sosial dan budaya dimana kegiatan dilakukan, termasuk mengidentifikasi norma – norma gender yang berlaku, mengungkapkan bagaimana struktur kekuasaan mempengaruhi gender dan bagaimana ini dapat diubah.

1.8.2. Situs Penelitian

Tempat atau situs penelitian dalam penelitian ini ialah Rifka Annisa Women's Crisis Center yang berlokasi di Kompleks Jatimulyo Indah, Jalan Jambon IV No. 69A, Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55241.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemimpin dari organisasi perempuan Rifka Annisa Woman Crisis Center dan masyarakat di daerah Yogyakarta yang turut aktif mengikuti kegiatan Rifka Annisa.

1.8.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari teks, kata-kata, dan simbol yang mencerminkan tindakan atau peristiwa dalam kehidupan sosial masyarakat. Data ini dapat berupa transkrip hasil wawancara atau catatan lapangan yang meliputi deskripsi situasi, sumber data pada penelitian ini diantaranya:

a). Data Primer

Sumber data yang memberikan data langsung kepada peneliti disebut sumber primer (Sugiyono, 2013). Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari pihak pertama atau subjek yang diteliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian sebagai narasumber utama untuk memperoleh informasi serta hasil observasi yang telah dilakukan.

b). Data Sekunder

Sumber data yang tidak memberikan data langsung kepada peneliti disebut sumber sekunder (Sugiyono, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber pendukung seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan internet.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya yakni menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi terstruktur dengan subjek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka, di mana pendapat dan ide subjek penelitian akan diminta (Sugiyono, 2013). Wawancara dianggap sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia subjek, untuk menggali makna dari pengalaman mereka, dan untuk mengungkapkan realitas yang mereka alami. (Creswell & Poth, 2018). Dalam etnografi kritis, wawancara mendalam dilakukan dengan pendekatan informal, interaktif, dan terbuka, namun tetap memperhatikan penggunaan bukti dan logika untuk mengungkapkan kebenaran mengenai suatu kondisi. Oleh karena itu, penulis perlu secara cermat mendengarkan dan mencatat setiap temuan yang disampaikan oleh informan selama proses pelaksanaannya.

Selain itu, dalam penelitian etnografi kritis peneliti juga akan melakukan observasi langsung pada Rifka Annisa terkait kegiatannya dalam menumbuhkan nilai – nilai kesetaraan gender. Selama kegiatan observasi berlangsung, kepekaan peneliti sangatlah dibutuhkan dalam membuat catatan lapangan (Kuswarno, 2008). Oleh karena itu, peneliti dapat memanfaatkan teknologi untuk merekam apa yang diamatinya.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis etnografi. Pada dasarnya, analisis data dalam etnografi berjalan bersamaan dengan proses pengumpulan data (Kuswarno, 2008). Sehingga ketika peneliti melengkapi catatan lapangan setelah melakukan interview dan observasi, pada saat itu secara tidak langsung peneliti telah melakukan analisis data. Tahap analisi data sendiri mencakup beberapa upaya seperti meringkas, memilih, menerjemahkan, dan mengorganisir data. Ada beberapa Langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian etnografi kritis antara lain (Spradley, 1979):

1. Menetapkan informan, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi karakteristik seorang informan. Semua orang dapat menjadi informan, tapi tidak semua orang dapat menjadi informan yang baik. Tantangan terbesar etnografi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan informan yang produktif. Ada lima syarat untuk memilih informan yang baik yaitu enkulturasi menyeluruh, keterlibatan langsung, memiliki cukup waktu, non analitik, dan suasana budaya yang tidak dikenal.
2. Melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara etnografi, peneliti dapat mengaplikasikan model percakapan persahabatan di dalamnya untuk memudahkan peneliti mendapat informasi yang dibutuhkan.
3. Membuat catatan etnografis. Ada beberapa jenis catatan lapangan yang berbeda yang akan jadi catatan etnografis, yaitu laporan

ringkas yang berisi catatan yang dilakukan selama wawancara atau observasi lapangan; laporan yang diperluas yang berisi catatan secara detail seperti transkrip wawancara.

4. Mengajukan pertanyaan deskriptif.
5. Melakukan analisis wawancara etnografis, tujuannya adalah untuk mengungkapkan sistem makna budaya yang digunakan oleh masyarakat yang diteliti. Ada empat macam analisis etnografis yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema.
6. Membuat analisis domain. Langkah – langkah dalam membuat analisis domain antara lain :
 - Memilih satu hubungan semantik tunggal. Dalam upaya mempermudah proses penemuan, maka paling baik jika penelitian dimulai dari hubungan semantik universal.
 - Mempersiapkan satu lembar kerja analisis domain. Gunakan lembar kerja yang terpisah sehingga membantu dalam visualisasi masing-masing domain. Masing-masing kertas kerja analisis domain menuntut untuk memasukkan informasi tertentu sebelum memulai pencarian: (1) hubungan semantic yang dipilih; (2) statemen dalam bentuk yang

diekspresikan; (3) contoh kalimat dari budaya yang memiliki istilah tercakup.

- Memilih satu sampel informan
 - Mencari istilah pencakupan yang memungkinkan dan sesuai dengan hubungan semantik
 - Memformulasikan pertanyaan – pertanyaan struktural untuk masing – masing domain
 - Membuat daftar untuk semua domain yang dihipotesiskan
7. Mengajukan pertanyaan struktural. Pertanyaan ini bertujuan untuk mendalami data yang telah didapat, baik data berupa istilah, maupun data terkait bahasa asli. Dengan menggunakan pertanyaan struktural, peneliti tidak perlu membuat kategori analitis untuk mengorganisir data dari wawancara pengamatan terlibat.
 8. Membuat analisis taksonomi, tujuannya adalah untuk membuat analisis makna yang mendalam untuk beberapa domain yang dipilih.
 9. Mengajukan pertanyaan kontras, tujuannya adalah untuk dapat mendorong penemuan banyak hubungan tambahan diantara objek yang diteleiti.
 10. Membuat analisis komponen. Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistematis berbagai atribut (komponen makna) yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. Apabila seorang etnografer menemukan berbagai kontras di antara suatu katogeri

maka hal yang terbaik adalah jika kontras ini dianggap sebagai atribut komponen makna dari suatu istilah. Beberapa langkah dalam membuat analisis komponen adalah

11. Membuat tema – tema budaya. Penentuan tema budaya ini boleh dikatakan merupakan puncak analisis etnografi. Keberhasilan seorang peneliti dalam menciptakan tema budaya, berarti keberhasilan dalam penelitian. Tentu saja, akan lebih baik justru peneliti mampu mengungkap tema-tema yang orisinal, dan bukan tema-tema yang telah banyak dikemukakan peneliti sebelumnya.
12. Menulis sebuah etnografi.

1.8.7. Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, kebenaran data dianggap penting untuk menemukan jawaban yang tepat. Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis *historical situatedness*, yang mempertimbangkan latar belakang sejarah dalam konteks sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender dari situasi yang diteliti (Denzin & Lincoln, 2009). Hal ini memungkinkan tindakan penelitian dalam mengikis ketidaktahuan dan kesalahpahaman, dan batas yang dapat dijangkaunya untuk menciptakan stimulus yang mendorong dilakukannya tindakan yakni mengubah struktur yang ada.